

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Kesimpulan

- a. Indonesia belum melakukan perbedaan terhadap objek cagar budaya dengan objek cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*). Pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) dewasa ini mengacu kepada UU No.11 Tahun 2010 yang menempatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sektor pimpinan. Pengelolaan *defense heritage* dewasa ini belum maksimal dilihat dari adanya *defense heritage* yang belum teridentifikasi, beralih fungsi, kurang terawat, dan hampir punah. Sesuai Peta Defense Heritage dan Level kategorisasi *defense heritage*, di Surabaya objek *defense heritage*-nya lebih banyak berupa Benteng, jembatan, dan bangunan. Terdapat *defense heritage* yang lebih terawat dibandingkan *defense heritage* lainnya, *defense heritage* yang beralih fungsi, dan *defense heritage* yang belum ada data tokoh pejuang atau masyarakat lokal. Sementara di Jakarta, *defense heritage*-nya lebih banyak pada pemaknaan sebuah tempat dalam bentuk kawasan atau situs bersejarah, museum, dan benda-benda perjuangan sebagai koleksi museum.
- b. Model pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) adalah sebuah upaya pemberian makna pada objek-objek *defense heritage* berdasarkan analisis Semiosis dan kemudian mengusulkan objek-objek *defense heritage* tersebut sebagai sarana program bela negara. Model pengelolaan *defense heritage* menempatkan Kementerian Pertahanan sebagai sektor pimpinan, terutama Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan, Kekuatan Pertahanan Kemhan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan. Ketiga unit Kemhan tersebut akan bekerjasama dengan sektor-sektor lainnya, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TNI, Pusjarah TNI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Model *defense heritage* terbagi menjadi 4 (empat) Model berdasarkan syarat-syarat *defense heritage*, yakni adanya bukti bahwa ada sejarah perjuangan bangsa di objek atau tempat tersebut, ada tokoh atau masyarakat setempat yang ikut berjuang, dan dikenali oleh masyarakat sekitar. Di Surabaya

model *defense heritage* adalah Level 1, yakni objek-objek *defense heritage* sudah dianggap terawat dan terpelihara, sehingga program-program bela negara yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan dalam bentuk sosialisasi dan informasi kepada masyarakat. Sementara itu di Jakarta model *defense heritage* adalah Level 4, yakni Kementerian Pertahanan akan mengusulkan Revitalisasi objek-objek *defense heritage* kepada sektor-sektor terkait.

## 5.2. Rekomendasi

Kajian ini mengusulkan model pengelolaan cagar budaya bernilai pertahanan (*defense heritage*) sebagai sarana program bela dengan menempatkan Kementerian Pertahanan sebagai sektor pimpinan yang dapat memasukkan materi pengayaan *defense heritage* ke dalam modul bahan ajar program bela negara Kemhan. Dalam pelaksanaannya, Kemhan dapat bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia (Pusjarah TNI), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan pemerintah kota atau provinsi.

Untuk pelaksanaan model pengelolaan *defense heritage* di Surabaya, Kemhan bekerjasama dengan Pemerintah kota Surabaya terutama berfokus pada pengelolaan *defense heritage* Level 4, yakni dalam bentuk penelitian objek-objek *defense heritage* yang kurang terawat, beralih fungsi, dan hampir punah.

Untuk pelaksanaan model pengelolaan *defense heritage* di Jakarta, Kemhan bekerjasama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta terutama berfokus pada pengelolaan *defense heritage* Level 1, yakni dalam bentuk pemanfaatan objek-objek *defense heritage* yang sudah terawat, namun belum masuk ke dalam modul atau bahan ajar program bela negara.

### 5.2.1 Kementerian Pertahanan

Kajian ini memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pertahanan, terutama Menteri Pertahanan, Direktur Bela Negara Kemhan, Balitbang Kemhan, dan Ditjen Kuathan Kemhan dalam merumuskan kembali program bela negara dengan memasukkan aspek-aspek pengelolaan *defense heritage* dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam hal pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara. Uraianannya sebagai berikut.

- a. Menteri Pertahanan: Menerbitkan Kebijakan Pertahanan Negara yang menuliskan dengan jelas bahwa *defense heritage* adalah bagian dari Doktrin Pertahanan Negara RI dan Kemhan adalah sektor pimpinan pengelolaan *defense heritage*;
- b. Ditjen Pothan DirBelNeg: Merevisi rencana kerja dengan memasukkan program-program kerja terkait dengan model pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara.
- c. Balitbang Kemhan: Melanjutkan kajian tentang *defense heritage* tahun anggaran 2021-2022 dan melakukan kajian lanjutan tentang pengembangan model pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara.
- d. Ditjen Kuathan Kemhan: Merevisi rencana kerja dengan memasukkan program-program kerja terkait dengan model) pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara.

### **5.2.2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI**

Kajian ini merekomendasikan kepada Kemdikbud RI untuk melakukan revisi UU Cagar Budaya dengan memasukkan Revitalisasi cagar budaya dan menerbitkan Permendikbud yang memasukkan *Defense Heritage* sebagai muatan lokal Kurikulum Pendidikan Nasional Tahun 2013, dalam bentuk muatan lokal.

### **5.2.3 Pemprov DKI Jakarta**

Kajian ini merekomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta, terutama Dinas Kebudayaan untuk mendata *defense heritage* yang ada di kota Jakarta dan berkoordinasi dengan Kemhan untuk mensukseskan pelaksanaan model pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara.

### **5.2.4 Pemkot Surabaya**

Kajian ini merekomendasikan kepada Pemerintah kota Surabaya, terutama Dinas Kebudayaan untuk mendata *defense heritage* yang ada di kota Surabaya dan

berkoordinasi dengan Kemhan untuk mensukseskan pelaksanaan model pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara.

### **5.2.5 Guru dan Murid**

Kajian ini merekomendasikan kepada guru dan murid untuk mensukseskan pelaksanaan model pengelolaan *defense heritage* sebagai sarana program bela negara dengan cara aktif terlibat dalam program-program bela negara yang akan memasukkan narasi tentang *defense heritage*.